



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 23 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

UNIT KERJA : UNIVERSITAS HASANUDDIN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **KHAIRUDDIN DJAWAD**
2. Jabatan : **KETUA DEPARTEMEN ILMU KESEHATAN KULIT DAN KELAMIN**
3. NHK : **930367**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **5.100.000.000**

1. Tanah Seluas 422 m2 di KAB / KOTA MAROS, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
2. Tanah Seluas 605 m2 di KAB / KOTA MAROS, HASIL SENDIRI Rp. 70.000.000
3. Tanah Seluas 151 m2 di KAB / KOTA MAROS, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000
4. Tanah Seluas 809 m2 di KAB / KOTA MAROS, HASIL SENDIRI Rp. 130.000.000
5. Tanah Seluas 387 m2 di KAB / KOTA MAROS, HASIL SENDIRI Rp. 90.000.000
6. Tanah Seluas 83 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000
7. Tanah Seluas 480 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 1.250.000.000
8. Tanah Seluas 71 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000.000
9. Tanah Seluas 168 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
10. Tanah Seluas 127 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN**

Rp. 900.000.000

1. MOBIL, HONDA CRV HONDA CRV TAHUN 2012 Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
2. MOBIL, MITSUBISHI XPANDER Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
3. MOBIL, HONDA CRV RS CRV Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 650.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 320.000.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. 150.000.000

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 249.500.000

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 6.719.500.000

III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 6.719.500.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.